

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pariwisata di Indonesia adalah salah satu sektor yang di andalkan untuk membantu peningkatan devisa negara. Keaneka ragaman potensi yang dimiliki Indonesia terutama pada bidang pariwisata perlu terus di dukung dalam perkembangannya, dengan begitu akan datang kemanfaatan yang menjamin di masa yang akan datang. Istilah pariwisata berdasarkan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Kepariwisata, menyebutkan bahwa “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Sedangkan pariwisata menurut Koen Meyers (dalam Simanjutak, 2015: 1) pariwisata pada dasarnya merupakan sebuah aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu, tujuan dari perjalanan tersebut bukan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan untuk memenuhi rasa ingin tahu, mengisi waktu luang, bersenang-senang atau untuk mencari pengalaman baru.

Menurut Yoeti (1996) kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “...*pari* yang berarti banyak, berkali-kali atau berputar-putar, dan wisata yang berarti perjalanan atau mengunjungi”. Berdasarkan hal itu pariwisata dapat diartikan sebagai kegiatan bepergian untuk melihat atau mengunjungi suatu tempat atau objek dengan tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa pariwisata bukan hanya aktivitas bepergian semata, tetapi merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai unsur yang terpadu, yang mana di dalamnya terdapat keterlibatan aktif antara wisatawan, masyarakat setempat, dan lainnya, dengan kata lain pariwisata dalam kaca mata undang-undang adalah suatu ekosistem yang menuntut sinergi antar elemen, dimana masyarakat lokal tidak sekedar menjadi objek, melainkan subjek aktif dalam pembangunan dan pengelolaan destinasi (Akhirman, 2019: 95).

Semua daerah memiliki karakteristik sosial, budaya serta geografis yang berbeda, sehingga potensi wisata yang dimiliki juga memiliki perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kondisi alam, sejarah lokal, serta nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya, oleh karena itu tidak semua daerah dapat mengembangkan jenis potensi yang sama.

Pariwisata berdasarkan daya tariknya terdiri dari 3 jenis. *Pertama* pariwisata alam, yaitu pariwisata dengan keunikan dari segi alamnya seperti laut, gunung, air terjun, sungai, hutan, ataupun daya tarik alam lainnya. *Kedua* pariwisata daya tarik khusus, adalah wisata yang memiliki keunikan khusus contohnya wisata olahraga, wisata rohani, wisata kuliner, dan wisata lainnya (Setiawati, 2021:50). *Ketiga* pariwisata budaya, menurut Nyoman S. Pendit (1990), pariwisata budaya merupakan sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang didasarkan pada daya tarik unsur-unsur kebudayaan suatu bangsa atau masyarakat lokal, yang meliputi adat istiadat, kesenian, peninggalan sejarah, sistem kepercayaan, serta nilai-nilai sosial dan tradisi yang masih hidup diantara masyarakat sehari-hari (Setiawati, 2021:50).

Hampir semua pulau di Indonesia mempunyai potensi wisata. Sektor pariwisata yang merupakan salah satu andalan negara pada sektor non migas tentunya perlu terus didukung dalam perkembangannya. Pada tahun 2017, secara global pariwisata sudah mengubah kehidupan banyak orang melalui mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mempercepat pembangunan.

Kondisi yang sama juga terjadi di Indonesia dimana sektor pariwisata pada tahun 2016 menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik dari segi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) maupun kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pemerintah Indonesia menargetkan kunjungan wisman sebanyak 12 Juta orang dan pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 260 Juta perjalanan, dengan proyeksi devisa yang dihasilkan mencapai 172 Triliun (Rusyidi, 2018:156). Melihat hal tersebut pengembangan pariwisata mulai menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam menunjang pengembangan daerah.

Agar tercapainya tujuan dari pariwisata tersebut, maka perlunya potensi pariwisata yang tersedia untuk dikembangkan. Pengembangan pariwisata menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan dan mengelola potensi lokal yang dimiliki setiap daerah. Terkait dengan perkembangan pariwisata Yoeti (dalam Simanjutak, 2015: 96) berpendapat bahwa pengembangan pariwisata merupakan sebuah bentuk usaha atau cara untuk meningkatkan atau mengembangkan sebuah potensi yang sudah ada, pengembangan pariwisata disuatu daerah haruslah dengan sebuah perencanaan yang matang sehingga dari perencanaan yang matang tersebut tidak hanya sekedar mengembangkan potensi wisatanya saja, akan tetapi dengan

pengembangan tersebut akan terbentuknya sebuah industri pariwisata yang pada nantinya bermanfaat baik untuk daerah itu sendiri, masyarakat, serta bidang sosial, ekonomi, dan budayanya.

Terbentuknya industri pariwisata di suatu daerah tentunya akan menjamin kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Industri pariwisata adalah bagian yang mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan penyediaan produk dan jasa bagi wisatawan, ini melibatkan sejumlah komponen seperti transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, atraksi wisata, dan layanan lainnya yang mendukung pengalaman wisatawan selama bepergian ke suatu destinasi.

Industri pariwisata memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian global, selain memberikan peluang lapangan kerja, industri ini juga menghasilkan pendapatan yang besar melalui kegiatan pengeluaran wisatawan. Industri ini dikenal dengan dampak multiplier-nya yang dapat mempengaruhi berbagai sektor ekonomi lainnya seperti, industri manufaktur, pertanian dan perdagangan.

Meninjau pariwisata dari segi ekonomi, seperti misalnya dari segi permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*), maka menurut G Janata (dalam Simanjutak 2015:1) industri pariwisata terdiri dari berbagai sub sektor diantaranya: *pertama*, transportasi yang meliputi moda transportasi seperti pesawat, kereta api, bus, kapal laut dan kendaraan pribadi yang digunakan untuk membawa wisatawan ke destinasi tujuan. *Kedua*, akomodasi adalah penyediaan tempat tinggal sementara bagi wisatawan, seperti hotel, resort, penginapan, vila atau rumah tamu. *Ketiga*, makanan dan minuman seperti restoran, *cafe*, dan tempat makan lainnya yang

melayani kebutuhan konsumsi wisatawan selama berada di lokasi destinasi. *Keempat*, atraksi wisata destinasi atau objek wisata yang menarik minat wisatawan seperti situs sejarah, budaya dan hiburan. *Kelima*, layanan wisata termasuk pemandu wisata, agen perjalanan, dan penyedia layanan lainnya yang mendukung pengalaman wisata (Wibowo, 2008:17).

Setiap terdapatnya kegiatan yang mendorong terjadinya kegiatan perjalanan wisata, maka akan selalu ada permintaan jasa-jasa pelayanan yang sifatnya menyatu atau tergabung walaupun produknya dihasilkan dari perusahaan yang berbeda-beda. Proses dari fenomena secara keseluruhan, sebagai akibat dari adanya orang-orang yang melakukan perjalanan dengan bermacam-macam tujuan, yang dapat menciptakan permintaan (*demand*) akan beragam pelayanan dari macam-macam perusahaan yang berbeda. Hal tersebut dapat disebut dengan istilah industri pariwisata.

Disebut sebagai industri pariwisata karena aktivitas rekreasi yang terkait dengan perjalanan wisata tidak hanya memiliki nilai sosial dan budaya, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, dalam konteks ini pariwisata dapat dilihat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Aktivitas wisata yang dilakukan oleh individu menghasilkan permintaan yang mendorong terciptanya pasar bagi produk dan jasa yang disediakan oleh berbagai perusahaan.

Setiap perusahaan yang terlibat dalam sektor ini, mulai dari penyedia akomodasi, transportasi, hingga penyedia atraksi dan layanan lainnya, berperan dalam memenuhi kebutuhan wisatawan. Berdasarkan hal tersebut dapat di pahami

bahwa yang dimaksud dengan industri pariwisata adalah sebuah ekosistem yang kompleks, dimana berbagai komponen yang berbeda, meskipun memiliki karakteristik dan produk yang bervariasi, bekerja bersama untuk menciptakan pengalaman wisata yang utuh bagi konsumen. Setiap subsektor memiliki peran penting dan saling melengkapi satu sama lain.

R.S Damarjadi menjelaskan bahwa industri pariwisata terdiri dari sejumlah kegiatan ekonomi yang saling terkait, seperti transportasi, akomodasi, makanan dan minuman serta elemen wisata lainnya. Pariwisata sebagai industri baru dikenal di Indonesia setelah dikeluarkannya instruksi Presiden RI NO.9 Tahun 1969 Tanggal 6 Agustus 1969 yang mengatur tentang pengembangan pariwisata di Indonesia, instruksi ini menjadi tonggak penting dalam menjadikan pariwisata sebagai industri yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian negara, dalam Bab II pasal 3, instruksi tersebut menekankan bahwa pariwisata harus dipandang sebagai sektor yang tidak hanya mendatangkan manfaat sosial tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan (Wibowo, 2008:19).

Beberapa daerah di Indonesia seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, dan Lombok yang sudah menjadi industri pariwisata tentunya sudah komplit dalam semua aspek pariwisata, akan tetapi tidak semua pariwisata di Indonesia sudah menjadi industri pariwisata, banyak daerah yang pariwisatanya masih dalam tahap pengembangan, salah satunya Provinsi Sumatera Barat.

Terkait dengan hal tersebut untuk membangun industri pariwisata di suatu daerah maka dibutuhkan sebuah pengelolaan yang optimal. Pengelolaan pariwisata adalah suatu usaha yang diupayakan pemerintah ataupun masyarakat untuk

menjaga keberlangsungan objek wisata. Pengelolaan itu tidak semata-mata terbatas pada kawasan, objek, dan daya tarik wisata saja melainkan juga mencakup wisatawan sebagai komponen pendukung dari wisata itu sendiri, karena keberlangsungan pariwisata bergantung kepada ketepatan pengelolaannya.

Pengelolaan pariwisata haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengutamakan kelestarian lingkungan, keberlanjutan sosial, serta kesejahteraan komunitas lokal. Hal ini mencakup penerapan kebijakan yang menjaga agar sumber daya alam dan budaya lokal tidak rusak atau tidak terdegradasi akibat kegiatan wisata. Prinsip dari penyelenggaraan pengelolaan kepariwisataan yang baik pada intinya dengan adanya koordinasi antar pemangku kepentingan yang ada serta keterlibatan aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak pemerintah, swasta serta masyarakat setempat (Palimbunga, 2017:16).

Saat ini, perjalanan yang didorong oleh rasa ingin tahu untuk mengunjungi tempat-tempat baru semakin menjadi *trend* di kalangan masyarakat modern. Keinginan untuk menjelajahi lokasi-lokasi baru, baik itu berupa destinasi alam yang indah maupun situs budaya dan bangunan bersejarah, sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Hal ini tercermin dalam meningkatnya minat orang untuk mencari pengalaman baru, baik untuk rekreasi maupun sebagai bagian dari eksplorasi diri.

Demikian juga bagi tempat- tempat wisata yang dikunjungi. Tempat yang menjadi destinasi kunjungan wisata , dan daerah tersebut menyediakan layanan berupa tempat tinggal, angkutan lokal, bahkan makanan yang khas di daerah tersebut. Hal tersebut jika dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat

tentunya akan memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat sendiri.

Salah satu strategi pengelolaan pariwisata yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal (*community based tourism*), yaitu konsep pembangunan yang berorientasi kepada konsep pariwisata berkelanjutan (Arida, 2017:20). Konsep yang berorientasi kepada pariwisata berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam semua aktivitas pariwisata mulai dari membangun, mengelola, hingga memanfaatkan, dengan tujuan terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan serta melindungi kehidupan sosial dan budayanya, sehingga implementasinya mampu mendukung tercapainya tiga pilar pembangunan keberlanjutan (*the three pillars of sustainability*) yaitu keberlanjutan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan (Suasapha, 2016:59).

Secara konseptual esensi utama dari pariwisata berbasis masyarakat yaitu menempatkan masyarakat sebagai penggerak utama dalam seluruh proses, dimulai dari tahap perumusan rencana, implementasi program, hingga proses pemantauan dan penilaian, dengan demikian manfaat dari kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukan kepada masyarakat. Sunaryo (dalam Rizkianto, 2017:51) menjelaskan bahwa terdapat tiga elemen pokok dalam strategi pengelolaan pariwisata yang berorientasikan kepada masyarakat.

Pertama, melibatkan masyarakat pada tahap pengambilan keputusan. *Kedua*, terdapat jaminan masyarakat setempat memperoleh keuntungan dari kegiatan pariwisata. *Ketiga*, program edukasi pariwisata bagi masyarakat setempat

sehingga dengan begitu terbentuknya masyarakat yang memiliki rasa tanggung jawab dalam melestarikan potensi yang ada.

Sumatera Barat adalah salah satu daerah yang mempunyai banyak ragam pariwisatanya yang cukup populer. Daerah ini tidak hanya dikenal dengan destinasi kuliner rendangnya saja, akan tetapi Sumatera Barat juga memiliki jenis wisata yang beragam diantaranya, seperti wisata alamnya dimulai dari pantai-pantai eksotisnya, wisata gunung, wisata danau, dan wisata air terjun. Hal ini terbukti dengan adanya sebuah acara populer televisi Korea Selatan *reality* dokumenter “*Law Of the Jungle*” yang mengambil lokasi syuting di pulau Sikuai dan Kepulauan Mentawai serta beberapa daerah lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa pariwisata di Sumatera Barat memiliki potensi untuk terus di kembangkan.

Salah satu tolak ukur dalam melihat perkembangan sebuah pariwisata adalah dengan melihat kunjungan wisatawan nya. Pariwisata di Sumatera Barat sebelum dilanda pandemi covid19 memiliki kunjungan wisata yang cukup tinggi, begitupun pasca pandemi, kunjungan wisatanya pada setiap tahunnya tercatat terus meningkat, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Kunjungan Wisatawan ke Sumatera Barat tahun 2022-2024

NO	Tahun Kunjungan	Jumlah Kunjungan
1	2022	6,2 Juta Kunjungan Wisata
2	2023	11,68 Juta Kunjungan Wisata
3	2024	14,2 Juta kunjungan Wisata

Sumber: BPS Sumatera Barat

Tidak hanya itu, Sumatera Barat juga kaya akan wisata budaya, wisata ini dapat dinikmati oleh para wisatawan melalui beragam festival kebudayaan seperti

festival Siti Nurbaya, festival pesona Mentawai, festival layang-layang, *pacu itiak*, *pacu jawi* serta festival adat lainnya. Salah satu daerah yang menjadi tempat tujuan wisata adalah Kabupaten Solok Selatan. Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah yang memiliki banyak potensi wisata adat, wisata sejarah serta wisata alamnya. Kekayaan potensi wisata tersebut dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.
Jumlah Objek Wisata Di Kabupaten Solok Selatan

Kecamatan	Objek Wisata Budaya	Objek Wisata Sejarah	Objek Wisata Alam
Sangir	6	4	14
Sangir Jujuan	7	1	3
Sangir Balai Janggo	7	0	4
Sangir Batang Hari	7	3	3
Sungai Pagu	8	8	1
Pauh Duo	8	0	5
KPGD	8	7	5

Sumber: Dinas Pariwisata

Solok Selatan dengan kekayaan potensi wisata memiliki minat kunjungan wisata yang cukup tinggi, walaupun kurang stabil di tahun 2021 karena adanya pandemi covid19, baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.
Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Solok Selatan 2022-2024

N0	Tahun Kunjungan	Jumlah Kunjungan
1	2022	149.503
2	2023	156. 531
3	2024	241.437

Sumber: Dinas Pariwisata 2023

Gambar 1.
Objek wisata Saribu Rumah Gadang dari Atas Menara Songket



Sumber : Data Primer 2023

Gambar di atas adalah salah satu hasil dokumentasi visual yang menampilkan keindahan *saribu rumah gadang*, yang diabadikan dari sudut pandang ketinggian tepatnya dari atas menara songket. Objek yang berfungsi sebagai sarana rekreasi bagi para pengunjung, karena memiliki daya tarik yang tinggi. Adanya wisata *saribu rumah gadang* diharapkan berdampak baik terhadap masyarakat setempat.

Pada kawasan wisata *saribu rumah gadang* juga terdapat salah satu mesjid tertua di Indonesia, yaitu mesjid Raya Koto Baru pembangunan mesjid ini di mulai pada tahun 1922 dengan arsitektur yang mirip dengan mesjid Rao-Rao yang berlokasi Kabupaten Tanah Datar yang memiliki arsitektur kolaborasi antara Persia dan Minangkabau. Mesjid ini dimanfaatkan sebagai media pembelajaran keagamaan bagi masyarakat setempat dan mesjid ini juga menjadi bagian dari daya tarik yang ada pada kawasan *saribu rumah gadang*.

Gambar 2.
Mesjid Raya Koto Baru



Sumber: Data Primer 2023

Potensi wisata disuatu daerah merupakan sebuah modal atau aset bagi masyarakatnya untuk membangun, mengelola, mengembangkan serta memanfaatkan potensi daerah mereka tinggal. Solok Selatan dengan hampir semua kecamatannya memiliki potensi wisata tentunya hal tersebut perlu terus didukung agar tercapainya kesejahteraan untuk masyarakatnya. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji terkait pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat agar terbentuknya industri pariwisata yang besar di Sumatera Barat yang salah satunya di Kabupaten Solok Selatan.

Salah satu aspek krusial dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas adalah partisipasi masyarakat lokal, dalam banyak kasus, pariwisata tidak hanya menghadirkan peluang ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial, budaya, dan lingkungan yang kompleks. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi hal yang sangat penting agar proses pembangunan destinasi tidak berjalan secara *top-down* atau sekadar berorientasi pada kepentingan luar, dalam konteks

ini, partisipasi masyarakat bukan hanya bentuk dukungan, tetapi juga bagian dari mekanisme kontrol sosial terhadap arah pembangunan di wilayahnya sendiri.

Cohen dan Uphoff (1980) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dibagi ke dalam empat bentuk utama, yaitu: partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi. Keempat bentuk ini memberikan gambaran bahwa partisipasi bukanlah sesuatu yang bersifat tunggal, melainkan berlangsung dalam berbagai tahapan dan tingkat keterlibatan, dengan menggunakan kerangka ini, partisipasi dapat dilihat sebagai proses yang memungkinkan masyarakat menjadi aktor aktif, bukan hanya objek pembangunan.

Meneliti partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata *saribu rumah gadang* menjadi penting karena kawasan ini memiliki kekayaan budaya dan potensi pariwisata yang khas. Namun, sejauh mana masyarakat lokal benar-benar terlibat dalam proses pengembangan kawasan ini masih menjadi pertanyaan penting. Apakah mereka dilibatkan sejak perencanaan, atau hanya menjadi pelaksana teknis tanpa akses pada manfaat yang seharusnya mereka peroleh? Apakah masyarakat memiliki ruang untuk mengevaluasi arah pembangunan wisata yang dijalankan.

Melihat partisipasi melalui lensa teori Cohen dan Uphoff, penelitian ini berupaya untuk mengungkap bentuk-bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi, serta bagaimana keterlibatan tersebut berkontribusi terhadap keberlanjutan pariwisata di tingkat lokal. Penelitian ini juga menjadi penting untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata *saribu rumah*

gadang tidak hanya menguntungkan pihak luar, tetapi benar-benar memperkuat posisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari banyaknya wisata di Kabupaten Solok Selatan, salah satu yang paling terkenal adalah kawasan *saribu rumah gadang*. Kawasan *saribu rumah gadang* merupakan objek wisata adat dengan daya tarik hamparan suasana perkampungan Minangkabau dengan 125 deretan rumah gadang yang saling berdampingan disepanjang jalannya. Selain dapat menikmati suasana perkampungan khas Minangkabau, pengunjung yang datang untuk berlibur juga dapat menikmati pertunjukan kesenian lokal seperti randai yang menjadi agenda wajib pada setiap minggunya, sedangkan untuk pengunjung yang menginap dapat merasakan sensasi tidur di ruang tengah rumah gadang bukan tidur di kamar seperti pada umumnya (Pristiwasa, 2017:4).

Kawasan *saribu rumah gadang* terletak di Kecamatan Sungai Pagu lebih tepatnya di Nagari Koto Baru. Pada tahun 2017 *saribu rumah gadang* mengukir prestasi tinglat nasional dalam Anugerah Pesona Indonesia dengan masuk nominasi kampung adat terpopuler yang dilaksanakan oleh kementrian pariwisata. Pada tahun 2011 kawasan *saribu rumah gadang* pernah dijadikan tempat syuting film layar lebar yang berjudul “Di Bawah Lindungan Ka’bah” cerita yang diangkat dari novel Buya Hamka. Wisata *saribu rumah gadang* memiliki minat kunjungan wisata yang cukup tinggi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.
Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung ke Kawasan Saribu Rumah
Gadang Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Jumlah wisatawan
1	2022	94.366
2	2023	76.234
3	2024	100.647

Sumber: Dinas Pariwisata

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa wisata kawasan *saribu rumah gadang* mempunyai minat kunjungan wisata yang tinggi. Dapat dibuktikan dari, kunjungan wisata yang meningkat setiap tahunnya meskipun ditahun 2021 terkendala covid.

Tingginya kunjungan wisata pada kawasan *saribu rumah gadang*, ternyata tidak menjamin berkembangnya objek wisata ini. Pada kenyatannya wisata ini masih belum berkembang dengan baik. Pengembangan pariwisata adalah salah satu langkah strategis untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan potensi wisata yang terdapat disetiap daerah. Proses pengembangan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik berupa perbaikan atau penambahan yang mencakup aspek fisik maupun non-fisik. Tujuan utama dari pengembangan pariwisata adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pariwisata, dengan mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan menggali potensi wisata yang ada disekitar mereka.

Setiap proses pengembangan pariwisata, akan melibatkan berbagai komponen yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lainnya. Sebagai contoh, pihak pemerintah selaku pihak yang bertanggungjawab atas pengembangan dapat menjalin kemitraan dengan para pihak swasta atau investor dalam mendukung

pembangunan kawasan wisata, dengan tetap melibatkan masyarakat setempat yang berada disekitar wilayah tersebut. Menurut Yoeti (dalam Haryanto, 2014:257) Keberhasilan dalam pengembangan sektor pariwisata ditandai dengan ketersediaan objek serta daya tarik wisata, didukung oleh fasilitas, aksesibilitas berupa sarana dan prasarana yang memadai, sehingga memungkinkan wisatawan untuk menjangkau dan mengunjungi suatu daerah atau destinasi wisata.

Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah guna menunjang potensi pariwisata yang sudah ada, seperti pengadaan lampu disepanjang jalan kawasan *saribu rumah gadang*, menara songket, bantuan revitalisasi untuk rumah gadang yang sudah rusak, serta pembekalan kelompok sadar wisata agar bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan pariwisata, bagaimana masyarakat menjadi tuan rumah yang baik, menyediakan yang terbaik, sehingga meninggalkan kesan yang baik untuk para wisatawan.

Hal ini mengacu kepada visi misi Dinas Pariwisata Kabupaten Solok Selatan “Terwujudnya Kabupaten Solok Selatan Menjadi Daerah Tujuan Wisata Budaya, Kesehatan, Petualangan Sejarah, dan Religius” dengan misi: “Meningkatkan Kualitas SDM, Sarana, dan Prasarana dalam Usaha Pariwisata. Membangun Kemitraan Antara Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta dalam Pembangunan, Pengembangan Pariwisata Ekonomi Kreatif. Serta Memberikan Pelayanan yang Optimal di Bidang Kepariwisata” (Dinas Pariwisata 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Pariwisata Ibuk Reni, Target pariwisata *saribu rumah gadang* pada tahun 2022 adalah mengoptimalkan *homestay* yang ada di kawasan *saribu rumah gadang* agar sesuai

dengan SOP yang sudah ditetapkan, seperti standar kamar tidur, kamar mandi serta harga untuk harga *homestay*nya sendiri. Akan tetapi hingga pertengahan bulan November 2022 target tersebut masih belum tercapai.

Hal ini disebabkan beberapa masyarakat pengelola *homestay* tidak menerapkan SOP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti untuk standar kamar mandi SOP nya harus menggunakan *closet* duduk akan tetapi masyarakat masih saja ada yang menggunakan *closet* jongkok, sedangkan bantuan *closet*, kasur dan bantal sudah diturunkan oleh pemerintah. Standar kamarnya diharuskan ada AC, walaupun demikian, dalam kondisi ini sebagian dari masyarakat masih saja ada yang tidak menghiraukan. Sedangkan untuk standar harganya dari sebagian masyarakat pengelola *homestay* ada yang menetapkan harga yang relatif tinggi.

Sedangkan pada proses revitalisasi wisata kawasan *saribu rumah gadang* yang dimulai pada November 2019 hingga rampung pada Desember 2020. Kegiatan ini meliputi pemugaran 32 rumah gadang dan beberapa rumah gadangnya akan dipilih untuk dijadikan *homestay*, serta penambahan infrastruktur penunjang diantaranya menara songket, galeri *saribu rumah gadang*, pusat kerajinan dan souvenir serta sentra kuliner, yang kegiatan tersebut melibatkan tukang-tukang *tuo* di kawasan *saribu rumah gadang*.

Akan tetapi dalam proses revitalisasi tersebut terdapat satu masalah yang melibatkan salah satu pemilik rumah gadang yang dijadikan *homestay* kaum setempat, dimana dana revitalisasi rumah gadang tersebut sudah paket lengkap dengan beberapa bantuan fasilitas di dalamnya, seperti kursi tamu, satu tempat tidur dan satu kasur dan bantal. Pada saat pemerintah daerah mengadakan pengecekan

ternyata barang- barang yang ada didalam rumah gadang merupakan barang yang dipinjam kepada masyarakat lain (wawancara, Septy 2022).

Pariwisata kawasan *saribu rumah gadang* yang sudah dioptimalkan dalam sarana dan prasarana yang mendukung oleh pemerintah daerah, seharusnya masyarakat juga turut mendukung pariwisata daerah mereka tinggal. Akan tetapi berdasarkan paparan diatas membuktikan bahwa wisata *saribu rumah gadang* belum sepenuhnya didukung oleh masyarakat. Pengembangan pariwisata tentu saja tidak cukup dengan pemerintahnya saja, idealnya pengembangan tersebut juga melibatkan masyarakat setempat.

Peran masyarakat atau yang sering dikenal dengan partisipasi masyarakat merupakan bagian faktor penentu keberhasilan pada pengembangan pariwisata. Peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkontribusi pada tumbuhnya rasa kepemilikan terhadap setiap program yang dirancang, sehingga memungkinkan masyarakat untuk turut berperan dalam mengarahkan kebijakan pengembangan serta lebih responsif dan berkelanjutan. Damanik (2009) menyatakan bahwa proses pengembangan pariwisata di Indonesia masih didominasi oleh inisiatif pemerintah, sementara keterlibatan masyarakat berlangsung secara pasif. Konsekuensinya, berbagai bentuk inovasi yang didanai dan digerakan oleh negara kerap menghadapi hambatan-hambatan yang krusial dalam pelaksanaannya (Maghrifah, 2021:4)

Raharjana (dalam Singgalen, 2017:200) memiliki pandangan bahwa peran masyarakat sangat vital dalam mendukung proses pembangunan pariwisata, khususnya dalam mengarahkan pengembangan agar tetap terkendali dan mampu

menekan potensi dampak negatif dari aktivitas kepariwisataan. Sementara itu, peran pemerintah dan sektor swasta lebih difokuskan pada aspek fasilitasi, sedangkan masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama dalam pengembangan destinasi wisata.

Peran masyarakat dalam pengembangan wisata memegang peran strategis, karena sebagai pihak yang hidup dan berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitarnya, mereka memiliki pemahaman yang lebih kompleks terhadap potensi lokal yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Jika sudah ada potensi, fasilitas, sarana prasarana penunjang, seharusnya wisata ini sudah berkembang dengan optimal. Berdasarkan hal tersebut peneliti menekankan permasalahan kepada “partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata kawasan *saribu rumah gadang* di Kabupaten Solok Selatan”. Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan pariwisata *saribu rumah gadang* berbasis masyarakat di Kabupaten Solok Selatan?
2. Apa saja bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata *saribu rumah gadang* di Kabupaten Solok Selatan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan pengelolaan pariwisata *saribu rumah gadang* berbasis masyarakat di Kabupaten Solok Selatan.
2. Mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata *saribu rumah gadang*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Antropologi, khususnya dalam kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata budaya, dengan studi kasus pada kawasan *saribu rumah gadang*.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pertimbangan bagi masyarakat lokal serta pemangku kebijakan seperti pemerintah daerah, dinas pariwisata, dinas koperindag serta pihak swasta lainnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi informasi yang relevan mengenai tata kelola objek wisata, khususnya wisata *saribu rumah gadang*.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata telah banyak dilakukan sebelumnya. Untuk memperluas pemahan teoritis sekaligus sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti merujuk sejumlah literatur yang relevan, sebagai mana diuraikan berikut ini: *Pertama*, Herdiana (2019) yang berjudul “*Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat*”. Pengembangan desa wisata merupakan salah satu bentuk kebijakan pembangunan wilayah pedesaan yang bertujuan melakukan diversifikasi ekonomi desa, yang sebelumnya di dominasi oleh sektor pertanian, dalam konteks ini masyarakat desa perlu diposisikan sebagai aktor utama sekaligus penerima manfaat dari pariwisata itu sendiri, sehingga keterlibatan

mereka secara aktif dalam seluruh tahapan proses pengembangan menjadi hal yang esensial.

Pengembangan desa tidak semata-mata ditunjukan untuk mengangkat nilai-nilai tradisi dan budaya lokal sebagai daya tarik wisata, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat setempat. Berdasarkan hal tersebut masyarakat tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan harus menjadi aktor utama sekaligus penerima manfaat dari proses pembangunan tersebut. Pendekatan pariwisata berbasis masyarakat memberikan ruang partisipatif yang lebih luas lagi bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap tahapan pengembangan pariwisata, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, dalam kerangka pengembangan desa wisata berbasis masyarakat, keberadaan masyarakat diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari entitas desa itu sendiri. Sehingga seluruh proses yang dijalankan diarahkan untuk mendorong pemberdayaan dan memastikan bahwa manfaat ekonomi, sosial dan budaya secara maksimal kembali kepada masyarakat itu sendiri.

Kedua, Nurdin (2016) yang berjudul “*Kajian Antropologi Pariwisata dan Ethno-Ecotourism dalam pengembangan Pariwisata di Provinsi Lampung*”. Penelitian ini mengadopsi pendekatan etnografi dengan tujuannya untuk mengkaji dinamika antropologi wisata dalam konteks pengembangan pariwisata alam yang berbasis pada potensi kearifan lokal masyarakat setempat. Melalui model *ethno-ecotourism*. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan destinasi wisata, dalam konteks pembangunan pariwisata, keterlibatan aktif dari berbagai pemangku

kepentingan, baik itu pemerintah maupun masyarakat lokal yang menjadi elemen penting, guna mencapai hasil yang sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah dirancang.

Pendekatan *ethno-ecotourism*, dalam pengembangan pariwisata di Lampung menekankan pada pemanfaatan kearifan lokal dan potensi alam sebagai basis utama pembangunan destinasi wisata. Strategi ini tidak hanya mengedepankan pelestarian lingkungan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat dalam pengelolaan pariwisata. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan ini diyakini mampu menghasilkan dampak yang lebih optimal dan berkelanjutan pariwisata di Lampung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wilayah Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang layak untuk dikembangkan sebagai objek destinasi wisata, akan tetapi terkendala dengan kurangnya dukungan masyarakat setempat, sehingga pengelolaannya masih jauh dibawah yang ditargetkan.

Ketiga, Caesarika, dkk (2021) yang berjudul “Strategi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Wisata Alam Sumber Maron, Kabupaten Malang”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis strategi pengelolaan pariwisata berkelanjutan dikawan wisata alam sumber maron. Mengkaji strategi pengelolaan pariwisata berkelanjutan dengan pendekatan partisipatif dan berbasis potensi lokal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pengelolaan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh potensi alam yang dimiliki kawasan, tetapi juga keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, terutama masyarakat lokal dalam semua proses pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga

evaluasi. Penelitian ini menekankan bagaimana pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, pengelola wisata, dan sektor wisata dalam menciptakan pengelolaan yang adaptif dan ramah lingkungan.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa salah satu tantangan dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan adalah ketimpangan distribusi manfaat serta minimnya kapasitas kelembagaan masyarakat, oleh karena itu mereka merekomendasikan penguatan kelembagaan lokal, penyusunan regulasi yang berpihak pada masyarakat serta program pendidikan dan pelatihan sebagai strategi untuk mendukung keberlangsungan kawasan wisata. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pendekatan berbasis masyarakat CBT merupakan landasan penting dalam mewujudkan pariwisata yang tidak hanya ekonomis, tetapi juga sosial kultural dan ekologis secara berkelanjutan.

Keempat, Rahmawati (2017) berjudul “ *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Ngalnggeran, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Mengkaji bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata berbasis budaya dan alam, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat studikasus untuk melihat bagaimana masyarakat berperan dalam organisasi pengelola, penyedia fasilitas wisata seperti hotel dan penginapan, serta kegiatan wisata edukukatif budaya. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran kelembagaan lokal, dukungan pemerintah daerah, serta modal sosial masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan wisata yang berkelanjutan.

Pengelolaan yang mengacu kepada konsep *community Based Tourism* (CBT) dan teori partisipasi yang menunjukkan tingkatan partisipasi masyarakat dari tingkat simbolik hingga tingkat kontrol penuh. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dapat mendorong keberhasilan destinasi wisata yang dikelola secara mandiri dan berbasis kearifan lokal. Dengan membandingkan konteks Nglanggeran yang sudah cukup optimal dengan SRG yang sedang dalam upaya pengembangan, dapat terlibat dalam pengambilan keputusan, dan dukungan sosial budaya masyarakat.

Penelitian ini relevan dengan fokus kajian peneliti yang terfokus pada kawasan *saribu rumah gadang*, karena sama-sama mengkaji bagaimana masyarakat terlibat dalam pengelolaan pariwisatanya. Serta bagaimana peran pemerintah daerah sebagai penyedia wadah dalam semua aktivitas wisata,

Kelima, Pujiah, dkk (2021) yang berjudul “*Strategi Pengelolaan Pariwisata di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Wisata Kawung Tilu Kabupaten Bekasi)*”.

Penelitian ini memfokuskan kepada strategi pada pengelolaan wisata Kawung Tilu pada masa pandemi Covid-19, dalam penelitian ini menyoroti pentingnya adaptasi dan inovasi dalam pengelolaan destinasi wisata selama krisis kesehatan global. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan dan praktik pengelolaan yang diterapkan di Kawung Tilu dalam menghadapi tantangan pandemi. Metode yang digunakan mencakup wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, serta analisis dokumen kebijakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wisata Kawung Tilu menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti pembatasan jumlah pengunjung,

penyedia fasilitas cuci tangan, dan penerapan *social distancing*. Selain itu mereka juga mengembangkan platform digital untuk memfasilitasi pemesanan tiket secara online dan menyediakan konten promosi virtual guna menarik minat wisatawan. Masyarakat lokal dilibatkan dalam proses adaptasi ini melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai protokol kesehatan serta pemanfaatan teknologi informasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami strategi pengelolaan pariwisata yang responsif terhadap situasi darurat kesehatan. Temuan ini relevan untuk diterapkan dalam pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan destinasi wisata di masa pandemi dan pasca pandemi, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Keenam, Ramadani (2024) yang berjudul “*Pengembangan Kawasan Wisata Saribu Rumah Gadang oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan Dalam Peningkatan Budaya Minang*”. Penelitian ini mengadopsi pendekatan Kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif guna menganalisis pengembangan kawasan wisata saribu rumah gadang oleh DISPARBUD kabupaten Solok Selatan dalam peningkatan budaya Minangkabau.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambat dari pengembangan wisata saribu rumah gadang adalah kurangnya dukungan pemerintahan dalam pengembangan wisata contohnya program pelatihan wisata kepada masyarakat tidak berjalan dengan lancar, serta kurangnya kerjasama dengan investor, yang dapat diartikan minimnya kolaborasi antara pemerintah atau pengelola kawasan wisata dengan pihak swasta yang memiliki pengalaman dalam

pengembangan pariwisata. Hasil dari penelitian ini juga menjelaskan sarana prasarana di kawasan wisata *saribu rumah gadang* seperti toilet umum masih kurang terkelola dengan baik, sehingga menyebabkan fasilitas tersebut menjadi rusak dan terbengkalai.

Kawasan wisata *saribu rumah gadang* di dalam peningkatan budaya Minangkabau, disimpulkan bahwasanya kawasan wisata *saribu rumah gadang* belum maksimal dalam melakukan pengembangan yang mana dapat dilihat dari layak finansial belum mencapai harapan yang diinginkan, hal ini disebabkan oleh alokasi dana anggaran belum merata kepada masyarakat. Disamping itu ada faktor penghambat pengembangan kawasan wisata *saribu rumah gadang* yaitu minimnya peran masyarakat di sektor pariwisata serta kurangnya prioritas pembangunan pemkab di kawasan wisata.

Ketujuh, Putra (2021) yang berjudul “*Pengembangan Kawasan Wisata Nagari Saribu Rumah Gadang Kabupaten Solok Selatan Berbasis Partisipasi Masyarakat*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa sarana prasarana penunjang wisata pada kawasan *saribu rumah gadang* masih kurang dan sering dicabut oleh pelaku-pelaku tertentu, keberadaan pusat oleh-oleh yang tidak ada padahal masyarakat memiliki peluang untuk membuka usaha souvenir dan makanan khas, serta ketersediaan tempat sampah yang masih belum tercukupi dengan baik.

Hasil penelitian juga menjelaskan bahwasannya partisipasi masyarakat di sekitar kawasan *saribu rumah gadang* dalam mendukung kawasan wisata masih kurang. Situasi ini dapat diamati dari minimnya pengelolaan terhadap daya tarik wisata serta minimnya upaya promosi untuk menarik wisatawan. Wisatawan

cenderung hanya berkunjung untuk berfoto-foto di area luar dan jarang masuk ke rumah *gadang* untuk langsung melihat kondisi di dalam rumah *gadang*.

Serta tidak adanya atraksi yang dapat dilakukan wisatawan jika berkunjung ke wisata *saribu rumah gadang*, seperti mengeksplorasi budaya lokal di kawasan tersebut atau sekedar menikmati kuliner khas daerah serta belajar tradisi dan tata kehidupan sehari-hari masyarakat yang berkembang di kampung adat *nagari saribu rumah gadang* tersebut. Padahal jika dikelola dengan baik ini akan dapat menjadi nilai tambah tersendiri bagi daya tarik kawasan *saribu rumah gadang*.

Kunjungan wisatawan ke suatu daerah umumnya di dorong oleh rasa ingin tau, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dalam konteks tersebut interaksi antara wisatawan dan masyarakat menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengalaman berwisata itu sendiri.

Interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal merupakan aspek fundamental dalam aktivitas kepariwisataan, terutama dalam konteks pariwisata berbasis budaya. Wisatawan tidak hanya terdorong oleh keinginan untuk menikmati keindahan atau fasilitas destinasi, tetapi juga untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam terhadap kehidupan sosial, nilai-nilai tradisional, dan budaya lokal daerah tujuan wisata. Oleh karena itu keberadaan masyarakat lokal menjadi posisi strategis sebagai sumber pengetahuan budaya sekaligus mitra interaktif dalam pengalaman berwisata bagi wisatawan itu sendiri.

Selama berada di kawasan wisata, wisatawan dan masyarakat lokal akan terlibat dalam berbagai bentuk interaksi, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Interaksi ini berpotensi memperkaya pengalaman wisatawan, sekaligus menjadi sarana transfer pengetahuan budaya dan penguatan identitas lokal. Terkait hal ini pengelolaan pariwisata seharusnya tidak hanya terfokus pada aspek fisik atau promosi destinasi saja, tetapi juga bagaimana menciptakan ruang partisipatif yang memungkinkan masyarakat lokal terlibat aktif dalam membentuk narasi dan pengalaman wisata.

Penelitian ini menjadi salah satu literatur yang relevan yaitu pada pengembangan wisata *saribu rumah gadang*. Literatur dari penelitian diatas dapat menjadi bahan tinjauan dan acuan bagi peneliti mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Kawasan *Saribu Rumah Gadang* di Kabupaten Solok Selatan, dari literatur diatas terdapat kesamaan topik yang dikaji. Namun terdapat perbedaan kepada fokus kajiannya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan pariwisata kawasan *saribu rumah gadang* di Kabupaten Solok Selatan.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

Pariwisata dipandang sebagai salah satu bentuk industri jasa yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Sebagai sektor andalan dalam upaya peningkatan penerimaan negara di luar sektor minyak dan gas. Pariwisata berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta pengembangan wilayah. Terkait penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata kawasan *saribu rumah gadang*. Penelitian ini berpijak pada pemahaman bahwa pengelolaan pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga

menuntut keterlibatan masyarakat lokal sebagai bagian dari upaya pembangunan yang berkelanjutan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun dari beberapa konsep utama diantaranya: Pembangunan, Conyers & Hills 1984 mengemukakan bahwa pembangunan tidak hanya sebagai proses peningkatan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai suatu upaya yang bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperluas pilihan-pilihan kehidupan manusia, dalam pandangan mereka pembangunan memiliki dimensi yang bersifat multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik yang saling berkaitan (Huraerah, 2008:12).

Sedangkan Katzs (1970) mendefenisikan pembangunan sebagai suatu perubahan besar dalam kehidupan suatu bangsa, dari keadaan yang kurang baik ke keadaan yang lebih baik. Pembangunan harus dipahami sebagai suatu usaha yang sadar dan terencana yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan sebagai *nation building* yang menekankan pentingnya pembinaan bangsa melalui upaya kolektif dan terkoordinasi (Huraerah, 2008:12).

Berdasarkan paparan diatas pembangunan dapat disimpulkan sebagai suatu proses transformasi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat yang berlangsung secara terencana dan berkelanjutan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang diturunkan dari pemerintah daerah sejatinya bertujuan mendorong, meningkatkan kualitas hidup

masyarakatnya. Tentunya dalam hal ini perlu didukung dengan partisipasi masyarakat agar tercapainya tujuan dari pembangunan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagai sasaran yang ingin capai, melainkan merupakan elemen penting yang menyatu dalam dinamika proses pembangunan itu sendiri. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam merumuskan dan menetapkan keputusan yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup mereka, serta memiliki peran dalam pelaksanaan keputusan tersebut, maka proses pembangunan menjadi lebih inklusif, efektif dan berkelanjutan. (Huraerah, 2008:21).

Sebuah proses pembangunan yang tengah berlangsung tentunya diperlukan pengelolaan yang optimal, yang mana pengelolaan adalah langkah awal dalam sebuah pembangunan sebagai upaya pencapaian tujuan yang sudah dibentuk. Pengelolaan dipahami sebagai suatu proses mengawasi kepada seluruh unsur yang berperan dalam implementasi kebijakan serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Menurut Terry 2009 (dalam Anugrah, 2021:18) mendefenisikan bahwa pengelolaan sebagai suatu proses yang terdiri dari serangkaian tindakan: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuacing*) dan pengendalian (*controlling*). Proses ini dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdya manusia dan sumberdaya lainnya.

Sedangkan pengelolaan menurut Nugroho 2003 (dalam Anugrah, 2021:19) mendefenisikan bahwa pengelolaan merupakan bagian yang berkaitan dengan

proses mengatur, mengurus, dan menangani sebagai sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.

Pengelolaan bidang pariwisata sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengutamakan pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta penghargaan terhadap nilai-nilai sosial setempat, sehingga pengalaman berwisata menjadi menyenangkan bagi pengunjung sekaligus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat daerah tujuan wisata. Cox 1985 (dalam Ardhi, 2012:1) menjelaskan beberapa prinsip pengelolaan pariwisata diantaranya:

1. Pengembangan dan pembangunan pariwisata harus didasarkan kepada nilai-nilai kearifan lokal dan sebuah keunikan yang mencerminkan lingkungannya.
2. Peningkatan mutu sumberdaya yang menjadi pondasi utama dalam pengembangan sektor pariwisata.
3. Pengembangan atraksi wisata idealnya bertumpu pada keunikan budaya dan lingkungan daerah tujuan wisata.
4. Pelayanan pariwisata harusnya berorientasi kepada keunikan budaya dan lingkungan.
5. Mempertimbangkan dukungan dari masyarakat setempat dalam upaya pengembangan kepariwisataan.

Pengembangan pariwisata berdasarkan paradigma baru dalam pembangunan serta pengelolaan pariwisata yang berorientasi kepada masyarakat, menganut model pemberdayaan yang mengedepankan partisipatif aktif masyarakat sebagai aktor utama dari semua aktivitas pariwisata. Hal ini dapat memberikan

peluang bagi masyarakat untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki, sebagai upaya penyeimbang terhadap peran pelaku usaha pariwisata.

Pariwisata dengan konsep CBT (*community Based Tourism*), pada dasarnya adalah isu strategis pada strategi pengembangan pariwisata masa kini, dimana pembangunan dengan konsep CBT berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat. CBT adalah gagasan penting sekaligus menjadi sorotan kritis dalam evolusi teori pembangunan pariwisata konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan, yang kerap menuai kritik setelah tidak memperhatikan keterlibatan masyarakat lokal dalam sebuah kegiatan kepariwisataan (Rizkianto,2017:49).

Konsep CBT merupakan strategi pembangunan pariwisata yang memberi peran utama kepada masyarakat, seperti dalam proses perencanaan, pengelolaan, hingga aktivitas pengawasan, dengan begitu manfaat dari pariwisata sebesar-besarnya diperuntukan kepada masyarakat, hal tersebut mengacu kepada tujuan pembangunan itu sendiri (Rizkianto, 2017:49). Bicara soal pembangunan berbasis masyarakat tentunya juga berbicara tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut, berdasarkan hal tersebut terdapat 3 prinsip pokok dalam konsep pembangunan CBT sebagai berikut:

- a. Melibatkan masyarakat lokal dalam tahap pembuatan keputusan
- b. Adanya kepastian bahwa masyarakat sekitar memperoleh manfaat dari kegiatan pariwisata
- c. Pelaksanaan program edukasi pariwisata bagi masyarakat sekitar

Pariwisata berbasis masyarakat di bentuk sesuai dengan prinsip keselarasan antara pemangku kepentingan, masyarakat serta pemerintah daerah, karena prinsip

dasar dari konsep pembangunan CBT adalah prinsip demokrasi yang artinya dimiliki masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri (Rizkianto, 2017:51).

Berbicara soal pembangunan serta pengelolaan sebuah destinasi wisata tetantunya juga bicara soal keterlibatan masyarakat, peran serta masyarakat atau yang di sebut dengan partisipasi. Partisipasi asal katanya dari bahasa Inggris “*participation*” yang berarti ikut serta atau mengambil bagian. Menurut Echols dan Shadilly (dalam Rellam, 2016; 65) partisipasi diartikan keterlibatan individu atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik melalui ungkapan pendapat maupun pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan ini bisa berupa kontribusi pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, atau sumberdaya lainnya serta ikut dalam menikmati hasil kontribusinya itu sendiri.

Cohen & Uphoff (1980) membagi partisipasi masyarakat ke dalam empat bentuk utama, yang mencerminkan tahapan dalam sebuah program atau kegiatan pembangunan termasuk dalam konteks pengelolaan pariwisata. Bentuk tersebut diantaranya: *Pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan, masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan, seperti merumuskan tujuan, menentukan kegiatan, dan mengambil keputusan awal yang mempengaruhi arah pengelolaan. Ini menunjukan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi ikut menentukan kebijakan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan, masyarakat berperan langsung dalam melaksanakan kegiatan atau program, seperti menjadi pemandu wisata, membuka *homestay*, atau menyediakan jasa dan produk lokal.

Ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dimana masyarakat merasakan manfaat dari kegiatan yang telah dilakukan, baik dalam bentuk ekonomi (pendapatan), sosial, maupun budaya (pelestarian nilai-nilai lokal). *Keempat*, partisipasi dalam evaluasi, dimana masyarakat dilibatkan dalam mengevaluasi program yang sedang atau telah berjalan. Mereka bisa memberikan masukan, kritikan, atau menilai keberhasilan dan hambatan dalam pengelolaan.

Sedangkan Fasli Djalal (dalam Ratnasari, 2020:281) mengemukakan bahwa, partisipasi juga diartikan sebagai keterlibatan kelompok atau masyarakat atas dorongan pembuat keputusan, yang dapat berupa penyampaian saran, pendapat, barang, keterampilan, bahan, maupun jasa. Selain itu partisipasi mencakup kemampuan kelompok untuk mengatasi masalah mereka sendiri, mengevaluasi berbagai pilihan, mengambil keputusan serta menyelesaikan masalah yang dihadapi.

H.A.R.Tilaar (dalam Ratnasari, 2020:281) menyatakan upaya untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi melalui penerapan sistem desentralisasi, dalam konteks ini masyarakat diajak berperan aktif melalui pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom-up*), dimana mereka dilibatkan secara langsung dalam proses merancang dan membangun masyarakatnya. Sementara itu Sundaningrum (dalam Sulastri, 2020:163) membagi bentuk partisipasi ke dalam dua kategori, berdasarkan cara masyarakat terlibat di dalamnya yaitu :

a. Partisipasi Langsung

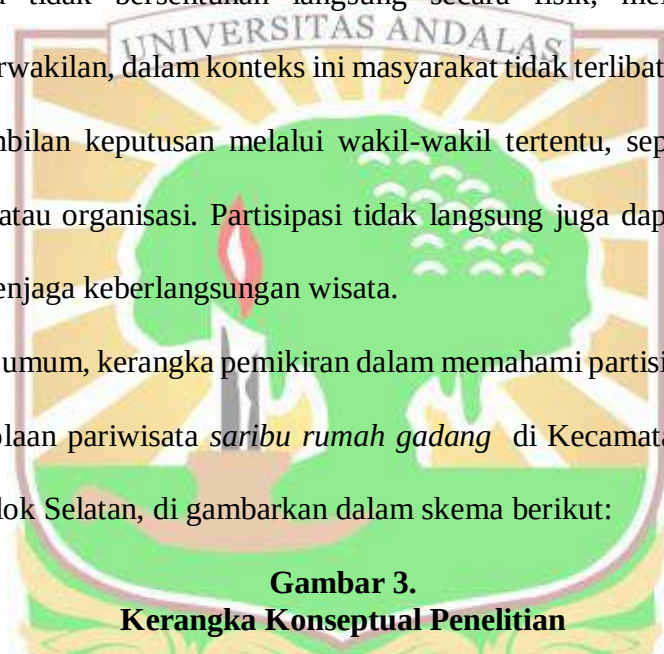
Partisipasi dapat dimaknai sebagai keterlibatan aktif individu dalam suatu proses sosial, yang ditunjukkan melalui tindakan nyata. Partisipasi ini terwujud

ketika seseorang mampu menyampaikan pendapat, berdiskusi mengenai permasalahan yang dihadapi, atau berkontribusi dalam bentuk tenaga dan waktu.

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi jika individu mendelegasikan hak partisipasinya. Cohen dan Uphoff (dalam Sulastri, 2020;165) partisipasi tidak langsung merujuk kepada bentuk keterlibatan masyarakat dalam sebuah proses yang bersifat tidak langsung atau tidak bersentuhan langsung secara fisik, melainkan melalui mekanisme perwakilan, dalam konteks ini masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan melalui wakil-wakil tertentu, seperti tokoh adat, lembaga adat atau organisasi. Partisipasi tidak langsung juga dapat dilihat ketika masyarakat menjaga keberlangsungan wisata.

Secara umum, kerangka pemikiran dalam memahami partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata *saribu rumah gadang* di Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, di gambarkan dalam skema berikut:



Gambar 3.
Kerangka Konseptual Penelitian

G. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif sebagai metode utama. Sugiyono (2018:14) pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial secara mendalam dan komprehensif dari sudut pandang partisipan atau objek studi, sedangkan sifat deskriptif dalam pendekatan ini menekankan pada penyajian data dan informasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang dikaji. Alasan peneliti menggunakan metode ini yaitu agar memudahkan peneliti dalam menjelaskan apa saja yang dianggap partisipasi oleh masyarakat dalam pengelolaan pariwisata *saribu rumah gadang*.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Terkait dengan masalah penelitian tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata *saribu rumah gadang*. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan dari sekian banyak wisata di Kabupaten Solok Selatan, yang paling eksis atau yang paling banyak di kenal orang adalah kawasan *saribu rumah gadang*, selain itu wisata ini dipilih sebagai ikon dari Kabupaten Solok Selatan. Beberapa prestasi yang pernah diraih, kawasan ini seharusnya sudah optimal dalam pengelolaannya sehingga dia berkembang dan mencapai targetnya, akan tetapi pada kenyataan yang ada, wisata ini belum optimal dalam pengelolaannya dengan berbagai tantangan yang ada, sehingga dalam pengembangan wisata ini tidak mencapai target yang diinginkan.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan sumber data utama dalam penelitian ini, yang berperan sebagai pemberi informasi terkait fenomena yang diteliti. Menurut Meleog (2017:76), infroman merupakan individu yang dipilih secara sengaja karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman atau keahlian khusus yang relevan dengan fokus penelitian. Infroman pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *purposiv sampling*. Pemilihan informan dengan metode *purposive sampling* adalah metode yang digunakan untuk menentukan informan, berdasarkan kriteria khusus, karena tidak semua orang layak atau relevan untuk dijadikan informan dalam suatu penelitian (Creswell, 2015:251). Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan keterlibatan mereka secara langsung dalam aktivitas pengelolaan kawasan wisata. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci dan informan biasa. Informan kunci meliputi wali *nagari*, pokdarwis, masyarakat serta pengunjung serta pengelola *homestay*. Informan kunci adalah sumber data yang dianggap tepat untuk memberikan informasi kenyataan yang ada dilapangan, terkait permasalahan yang sedang diteliti. Infroman kunci tidak hanya memiliki pengetahuan, akan tetapi juga menjalani praktik dan realitas sosial sehari-hari di dalam kawasan wisata, contohnya dalam kontesk kawasan *saribu rumah gadang*, pemilihan informan kunci pada pengelola *homestay* yaitu *homestay* 003, sebagai representasi dari pelaku usaha *homestay* di kawasan *saribu rumah gadang* didasarkan pada pertimbangan historis dan strategis. *Homestay* 003 merupakan *homestay* pertama yang berdiri di kawasan wisata *saribu rumah gadang*, sehingga keberadaannya memiliki nilai

penting dalam melihat dinamika awal, proses perkembangan, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.

Sebagai unit usaha yang lebih dahulu berdiri, *Homestay* 003 memiliki pengalaman yang lebih panjang dalam menghadapi berbagai tantangan, menyesuaikan diri dengan kebutuhan wisatawan, serta menjalin interaksi dengan pihak pemerintah maupun pengunjung. Informasi yang diperoleh dari pengelola *Homestay* 003 dianggap mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang proses awal pembentukan usaha *homestay*, termasuk motivasi, strategi adaptasi, serta peran masyarakat dalam pengembangan destinasi secara berkelanjutan, dengan menjadikan *Homestay* 003 sebagai informan kunci, peneliti dapat menggali narasi yang merepresentasikan proses pertumbuhan dan pembelajaran kolektif dari pelaku *homestay* lainnya di kawasan ini. Selain itu, karena posisinya sebagai pelopor, *Homestay* 003 juga sering dijadikan rujukan atau panutan oleh pelaku usaha *homestay* lainnya, sehingga perspektif dari pengelolanya dipandang relevan untuk dijadikan sumber utama dalam memahami bentuk partisipasi masyarakat dalam sektor akomodasi wisata di *saribu rumah gadang*.

Sedangkan informan biasa dalam penelitian ini meliputi dinas pariwisata dan dinas koperindag. Informan biasa dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki peran struktural dan kebijakan dalam pengelolaan wisata *saribu rumah gadang*. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan kunci dan informan biasa yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 5.
Informan Penelitian

No	Nama	Peran	Umur	Jenis Kelamin	Keterangan
1	Upiak Jarnelly	Pemilik homestay	60 Tahun	P	Informan kunci
2	Ahmad Julani	Wali Nagari	47 Tahun	L	Informan kunci
3	Dt. Jurianto	Niniak Mamak	70 Tahun	L	Informan kunci
4	Dt. Bandaro Putiah	Niniak Mamak	65 Tahun	L	Informan Kunci
5	Joni	Kepala Jorong Lubuk Jaya	40 Tahun	L	Informan kunci
6	Ozi Rahmana	Ketua Pokdarwis	30 Tahun	L	Informan kunci
7	Nela Ariswa	Masyarakat	37 Tahun	P	Informan kunci
8	Oyon	Masyarakat	54 Tahun	L	Informan kunci
9	Erniawati	Masyarakat	50 Tahun	P	Informan kunci
10	Rosma	Masyarakat	59 Tahun	P	Informan kunci
11	Nerti	Masyarakat	35 Tahun	P	Informan Kunci
12	Dwita	Pelatih Sanggar	31 Tahun	P	Informan Kunci
13	Fauzan Ghandesi	Pemuda	27 Tahun	L	Informan Kunci
14	Afri Haryono	Masyarakat	30 Tahun	L	Informan kunci
15	Ulva Adela Putri	Wisatawan	28 Tahun	P	Informan Kunci
16	Septy Dwita	Pengelola Homestay	29 Tahun	P	Informan Kunci
17	Angela	Wisatawan	29 Tahun	P	Informan Kunci
18	Reni wistri	Staf Bidang kebudayaan Dinas Pariwisata	30 Tahun	P	Informan Biasa

No	Nama	Peran	Umur	Jenis Kelamin	Keterangan
19	Nadin	Staf Pengembangan Destinasi wisata	34 Tahun	P	Informan Biasa
20	Akmal Hamidi	Kepala Dinas Koperindag	48 Tahun	L	Informan Biasa

4. Teknik Pengumpulan Data

Creswell (2015:26) menggambarkan teknik pengumpulan data sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang saling terkait dengan maksud untuk memperoleh keterangan yang akan memberikan jawaban atas persoalan-persoalan riset yang muncul. Peneliti mengawali dengan menentukan tempat dan individu yang ingin di pelajari. Fase- fase yang lazim dalam prosedur pengambilan data yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu prosedur pengumpulan data, yang mana peneliti secara langsung turun lapangan guna memantau aktivitas yang berlangsung lokasi. Observasi adalah proses pengumpulan data atau informasi faktual yang diperoleh langsung di lapangan dan dicatat secara sistematis dalam buku catatan lapangan. Melalui pengamatan ini, peneliti secara langsung melihat, mendengar, serta merasakan kondisi dan kejadian yang berlangsung di lokasi penelitian. Prosedur pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan valid selama proses observasi berlangsung (Creswell, 2015:222).

Selama proses observasi, peneliti mengamati dan memantau kondisi wisata *saribu rumah gadang*, memantau aktivitas yang meliputi aktivitas masyarakat setempat, aktivitas pengunjung, aktivitas pengelola *homestay*. Observasi yang peneliti lakukan yaitu: melihat bagaimana aktivitas masyarakat jorong Lubuk Jaya ketika melaksanakan agenda membersihkan kampung, mengamati aktivitas pengelola *homestay* ketika kedatangan tamu, mengamati aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan ketika berada di kawasan wisata *saribu rumah gadang*.

b. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara merupakan prosedur pengumpulan data yang memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam dan langsung dari sumbernya (Sugiyono, 2018:140). Saat wawancara berlangsung peneliti memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terbuka serta memberikan ruang bagi informan agar mengisahkan pengalamannya dengan leluasa tanpa merasa canggung.

Sebelum melaksanakan penggalian informasi peneliti terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara yang berisikan pertanyaan terkait dengan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata ini. Pada saat penelitian berlangsung, peneliti melakukan wawancara dengan informan kunci diantaranya ketua Pokdarwis, Pemuka adat, *Wali Nagari*, Masyarakat, Wisatawan serta Pengelola *Homestay* di kawasan wisata *saribu rumah gadang*. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara mendalam yang

nantinya diharapkan akan memperoleh sebuah informasi dan data yang peneliti butuhkan.

Melalui wawancara mendalam ini peneliti memfokuskan untuk memperoleh gambaran riil mengenai bagaimana bentuk pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya dinas yang berwenang seperti dinas pariwisata, dinas koperindag. Termasuk sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan wisata *saribu rumah gadang*. Selain itu peneliti juga menggali berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan wisata, baik dalam bentuk partisipasi langsung maupun partisipasi tidak langsung.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis maupun visual yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumentasi dapat berupa dokumen resmi, laporan, arsip, foto, video, serta catatan lapangan yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2018:476). Teknik dokumentasi digunakan untuk menjaring data yang bersifat tertulis, visual, maupun arsip digital yang berkaitan dengan pengelolaan dan aktivitas pariwisata di kawasan *saribu rumah gadang* Solok Selatan.

Melalui dokumentasi peneliti memperoleh berbagai jenis data, diantaranya : dokumen kebijakan pariwisata, struktur organisasi pokdarwis, data jumlah pengunjung wisata kawasan *saribu rumah gadang*, dokumentasi

homestay, menara songket, *rumah gadang*, Galeri saribu *rumah gadang*, sentra kuliner *saribu rumah gadang*, pusat kerajinan *saribu rumah gadang*. Media massa dan promosi wisata *saribu rumah gadang*.

5. Analisis Data

Creswell (2015:251) menerangkan bahwa analisis data diawali dengan persiapan dan pengorganisasian data kedalam bentuk teks, transkrip, maupun data visual seperti gambar atau foto. Analisis data merupakan proses yang dilakukan peneliti untuk menginterpretasikan serta menyusun data yang telah dikumpulkan di lapangan, baik melalui wawancara. Catatan lapangan, maupun sumber data pendukung lainnya. Tujuan dari proses ini adalah untuk mempermudah penjelasan terhadap temuan peneliti secara sistematis.

Tahapan analisis data diawali dengan pemeriksaan berbagai sumber data yang tersedia, antara lain dari pengamatan yang dituangkan dalam bentuk buku catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumentasi dan lainnya. Tahapan yang digunakan diantaranya pertama adalah reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan data yang dianggap relevan dan penting untuk dianalisis. Tahap berikutnya adalah penyajian data, dimana hasil reduksi disusun dan disajikan dalam bentuk yang lebih sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan fenomena yang diteliti.

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, dimana peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan, lengkap dengan bukti yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Melalui tahapan ini proses analisis data tidak

hanya sekedar pengelolaan data, tetapi juga merupakan upaya untuk memahami makna dan hubungan antar data guna menghasilkan temuan data yang akurat.

H. PROSES JALANNYA PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di *Nagari* Koto Baru yang berada di Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Proses penelitian ini berlangsung sejak tanggal 2 Desember 2022 hingga Juni 2023, dengan durasi kurang lebih enam bulan. Sebelum menentukan fokus penelitian terkait wisata, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi awal di kawasan objek wisata *saribu rumah gaang* sejak agustus 2022. Setelah melakukan pengamatan dan kajian awal, peneliti memutuskan untuk mengambil tema tersebut sebagai topik kajian ditugas akhir.

Pemilihan tema ini dilandasi oleh kenyataan bahwa *sairbu rumah gadang* merupakan salah satu destinasi wisata unggulan sekaligus ikon budaya Kabupaten Solok Selatan. Ketertarikan peneliti terhadap potensi dan keunikan kawasan ini kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Melalui diskusi yang konstruktif, pembimbing memberikan dukungan penuh terhadap rencana penelitian ini, sehingga peneliti mulai menyusun proposal sebagai langkah awal pelaksanaan.

Proposal penelitian disusun secara bertahap dan melalui proses revisi yang cukup panjang hingga memperoleh persetujuan dari dosen pembimbing. Penyusunan proposal ini tidak hanya menjadi dasar bagi pelaksanaan penelitian, tetapi juga sebagai gambaran awal dari tugas akhir yang akan diselesaikan. Setelah melewati proses penyusunan dan seminar proposal, peneliti resmi memasuki tahap penelitian lapangan.

Sebelum melakukan kegiatan di lapangan, peneliti terlebih dahulu meminta surat izin penelitian resmi dari Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Surat tersebut kemudian disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta pihak Wali Nagari Koto Baru guna memperoleh legalitas dan dukungan administratif dalam pelaksanaan penelitian di wilayah tersebut.

Setelah seluruh persiapan administratif dan teknis diselesaikan, peneliti kemudian memulai tahap pelaksanaan penelitian lapangan yang berlokasi kawasan *saribu rumah gadang*. Selama penelitian, peneliti tinggal dirumah sendiri dikarenakan peneliti harus merawat orang tua yang sedang sakit. Perjalanan menuju lokasi penelitian ditempuh selama kurang lebih satu jam perjalanan. Sesampainya di lokasi, peneliti mulai mengumpulkan data penting terkait pengelolaan serta latar belakang penetapan kawasan *saribu rumah gadang* sebagai destinasi wisata, untuk memperoleh informasi yang mendalam, peneliti melakukan wawancara dengan informan kunci yang sebelumnya sudah peneliti tentukan sistematiknya.

Perjalanan peneliti dalam setiap tahapan penelitian diwarnai oleh suka dan duka, yang mana penelitian ini harus peneliti barengi dengan merawat orang tua yang sedang sakit, kondisi tersebut menyebabkan peneliti tidak dapat hadir di lokasi penelitian setiap hari. Oleh karena itu, peneliti mengatur jadwal kunjungan secara berkala agar proses pengumpulan data tetap berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.. Peneliti hanya bisa datang ke lokasi penelitian sekurang kurangnya 1 kali dalam seminggu dikarenakan peneliti bekerja dan mengurus orang tua yang sedang sakit.

Selama proses penelitian berlangsung, peneliti melakukan beberapa teknik pengumpulan data utama, yaitu wawancara, obsevasi langsung dan dokumentasi. Setiap kali datang ke lapangan, peneliti berusaha berinteraksi langsung dengan masyarakat, baik secara formal maupun informal, untuk memahami konteks sosial mereka secara lebih alami.

Sedangkan untuk wawancara, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan memilih informan yang relevan seperti tokoh adat, pelaku wisata lokal, pengelola *homestay*, perangkat *nagari*, serta warga masyarakat yang ada di kawasan *saribu rumah gadang*. Wawancara peneliti lakukan secara semi-terstruktur, agar tetap fleksibel dalam menggali informasi tetapi sesuai dengan arah fokus penelitian.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan dokumentasi terhadap berbagai aktivitas wisata di lokasi, termasuk mengambil beberapa foto kegiatan wisata, mencatat pertemuan atau agenda *nagari* yang berkaitan dengan pengelolaan wisata, serta mengumpulkan dokumen seperti data dari kantor wali *nagari*, foto dari pengelola *homestay*, dan berbagai arsip yang peneliti penting sebagai data dari penelitian.

Peneliti juga melakukan observasi partisipatif, dimana peneliti tidak hanya mengamati, tetapi juga berusaha hadir dan ikut dalam beberapa kegiatan masyarakat, salah satunya saat gotoroyong membersihkan pekarangan *rumah gadang*, serta peneliti juga ikut menghadiri saat acara adat *mandabiah kabau nan gadang*. Dari hasil observasi ini peneliti bisa melibat langsung bagaimana bentuk

partisipasi masyarakat, baik formal maupun informal dalam mendukung kegiatan pariwisata.

Proses ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada kalanya peneliti harus menyesuaikan jadwal dengan informan, atau menghadapi kendala seperti cuaca, keterbatasan akses informasi, hingga perlu membangun kepercayaan terlebih dahulu agar informan merasa nyaman untuk bercerita. Kendala lainnya yang peneliti hadapi dimana peneliti sedikit keteteran dalam menjalani penelitian dengan kedaan orang tua yang sedang sakit, sedikit susah untuk peneliti membagi waktu untuk menjalankan penelitian karena jarak ke lokasi penelitian cukup memakan waktu.

Selama proses pengumpulan data, peneliti tidak hanya fokus pada masyarakat lokal dan pelaku wisata, tetapi juga melakukan penelusuran ke instansi pemerintah yang terlibat langsung dalam pengelolaan kawasan wisata *saribu rumah gadang*. Salah satu kunjungan penting peneliti adalah ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Solok Selatan. Di Disparbud peneliti mencari informasi terkait strategi pengelolaan kawasan wisata SRG secara menyeluruh, terutama bagaimana pemerintah memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana wisata, informasi terkait kunjungan ke wisata SRG, serta siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur pendukung wisata seperti galeri *saribu rumah gadang*, sentra kuliner dan pusat kerajinan.

Melalui wawancara dengan staf dinas, peneliti mendapatkan informasi bahwa pengelolaan langsung terhadap fasilitas-fasilitas penunjang tersebut bukan sepenuhnya berada di bawah kendali Dinas Pariwisata, melainkan merupakan

kewenangan dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag). Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan kawasan wisata SRG, terdapat pembagian peran lintas instansi yang penting untuk dipahami.

Setelah mendapatkan informasi tersebut, peneliti kemudian melanjutkan proses penggalian informasi ke Dinas Koperindag. Disana, peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui lebih jauh tentang mekanisme pengelolaan galeri SRG, sentra Kuliner, dan pusat kerajinan, termasuk bagaimana pengelolaan yang dilakukan, apakah oleh pemerintah secara langsung, berkerja sama dengan UMKM, atau melalui sistem kemitraan dengan masyarakat lokal.

Dari proses ini peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan kawasan wisata *saribu rumah gadang* melibatkan koordinasi antar instansi, yang berimplikasi pada pentingnya sinergi antara kebijakan pariwisata dan pengembangan ekonomi lokal agar pengelolaan wisata dapat berjalan optimal dan berbasiskan kepada masyarakat

Setelah melalui proses penelitian yang lumayan panjang dengan berbagai kendala yang dihadapi, akhirnya seluruh tahapan penelitian ini berhasil diselesaikan. Akhirnya dengan buah kesabaran dan keyakinan, peneliti bisa menyelesaikan penelitian ini sehingga bisa menuliskan dalam bentuk tugas akhir atau skripsi.

